

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Kurnia Wahyudi. (2010). *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo.
- Arikunto, Suharni. (2003). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Babang Trisantoso Soemantri, (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Bintarto, R , (1983) *Interaksi Desa Kota*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- AW, Widjaja. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- H.Busroh, Abu Daud. (2013). *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HR, Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Huda, Ni^{matul}. (2011). *Dinamika ketatanegaraan Indonesia da alam putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Prees, Yogyakarta.
- Jeddawi, Dr. Murtir. (2008). *Reformasi Birokrasi. Kelembagaan & Pembinaan PNS*.
- Moch.Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press.

- Prajudi Admosudirjo. (1998). *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.
- Purnomo Joko. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- R, Bintarto. (1983). *Interaksi Desa Kota*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *ilmu hukum*, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rosidin, Utang. (2019). *Pemberdayaan desa dalam sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Sarman dkk. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- SF.Marbun. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*, UII Press, Yogyakarta.
- Sitti Mawar , Nurdin Syah. (1986). *Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik* Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1998). *pokok-pokok sosiologi hukum*, PT J.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemantri, Trisantosis, Babang. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.

Suharni Arikunto. (2022). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT.
Rineka Cipta, Jakarta.

Suprin Na'a, Syarifudin, Ateng. (2010), *Republik Desa*, Alumni, Bandung.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Vieta Imelda cornelis. (2015). *hukum pemerintahan daerah (pengaturan dan
pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan dan pedalaman
dalam perspektif kedaulatan bangsa) aswaja pressindo (members of
lakbang group)* Surabaya.

Wahyudi, Kurnia, Akbar. (2010). *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra
Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat
Desa.

Sumber Journal

Ahmad sutrisno, *kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.

Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10-11, *Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Penerbit Petita, Vol 3, No 2, 2018 Januari-Juni

Jefri s, pakaya, “ *Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (the providing of village in the context of regional autonomy)*”, jurnal ligelasi indonesia: Vol, 13 No. 01-maret 2016.

Muhammad Indrawan, 2016, “*Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, “eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4.

Nanang Zulkarnaen, Maemunah, 2018, *kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di tinjau dari*

undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, CIVICUS | FKIP

UMMat Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1.

Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6,
Tahun XII.

Vieta Imelda cornelis, 2015, *hukum pemerintahan daerah (pengaturan dan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif kedaulatan bangsa) aswaja pressindo (members of lakbang group) Surabaya.*

Yani Alfian & Apip Pudih Rahmat, 2019, *peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat desa di desa sangkanhurip kecamatan katapang kabupaten bandung* Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 3, Nomor 3.

Sumber Elektronik:

http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/ Diakses terakhir tanggal 7 November 2019.

LBH Sembilan Delapan, “Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Artikel Ilmiah, (Diakses Pada hari kamis Tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.38 WIB).

LBH Sembilan Delapan, “Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Artikel Ilmiah, (Diakses Pada: 16 Desember 2021).

ST.Dwi Adiyah Pratiwi, ”Kepala Desa bukan Raja :Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsman.go.id/> , Diakses pada hari selasa Tanggal, 26 Oktober 2021, Pukul 10.21 WIB.